

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka mengetahui kinerja instansi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun melakukan penilaian kinerja yang dimulai dengan menentukan indikator kinerja dan variabelnya. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator input (masukan), out put (keluaran), dan out come (hasil), benefit (manfaat) dan impact (dampak).

Indikator input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundangan yang berlaku. Indikator out put (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik atau non fisik. Indikator out come (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator benefit (manfaat) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Sedangkan indikator impact (dampak) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang ditetapkan. Selanjutnya dilakukan penilaian kinerja dengan menggunakan piranti Form RKT (Rencana Kinerja Tahunan), Form PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan) dan Form PPS (Pengukuran Pencapaian Sasaran) sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.

A. CAPAIAN KINERJA

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapairumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasilmaupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan

prinsip *goodgovernance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bias dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian danpertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Sebagai bagian dari komitmen Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web-monev adalah bagian kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparan dan berorientasi pada perbaikan pelayanan publik. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam mengukur skala capaian kinerja instansi pemerintah, berikut ini adalah Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	100% ≤	Tercapai Target	
2	≤ 100%	Tidak Tercapai Target	

B. PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kera mendukung Visi Bupati Madiun dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2019-2023, yaitu : **“Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak”**. Berdasarkan Misi ke-4 (empat) yaitu :” **Meningkatkan**

Kesejahteraan yang berkeadilan".Yang memiliki 1 Tujuan ke-2 yaitu : "Meningkatkan Kualitas Pembangunan Masyarakat" dengan Indikator Tujuan : "Indeks Pembangunan Manusia". Adapun Misi ke-4 memiliki Sasaran ke-3 yaitu : "Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi Masyarakat", dengan Indikator Sasaran yaitu : Persentase Penurunan Kemiskinan dan Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)."

Dengan Capaian Kinerja sebagai Berikut :

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)							
INDIKATOR KINERJA		Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2019 terhadap RPJMD 2023(%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,81	3,80	3,62	95,26	3,09	117,15

Berdasarkan Tabel di atas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Madiun Tahun 2019 mengalami penurunan dari target sebesar 3,80% teralisasi sebesar 3,62% atau dengan Capaian Kinerja sebesar 95,26 %. Capaian Kinerja 2019 terhadap RPJMD Tahun 2023 sebesar 117,15%.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel di bawah ini, selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun untuk tahun 2019. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun tahun 2019 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)							
INDIKATOR KINERJA		Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2018 terhadap RPJMD 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,52	66,41	70,47	106,11	66,68	105,68

Berdasarkan Tabel di atas Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Madiun Tahun 2019 mengalami kenaikan dari target sebesar 66,41% teralisasi sebesar 70,47% atau dengan Capaian Kinerja sebesar 106,11%. Capaian Kinerja 2019 terhadap RPJMD Tahun 2023 sebesar 105,68%.

C. EVALUASI DAN ANALIS CAPAIAN KINERJA 2019

Berdasarkan Perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Madiun 2019-2023, strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam 8 program dan 28 kegiatan. Berikut ini kegiatan Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Program Kegiatan I :	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
-----------------------------	---

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja							
INDIKATOR KINERJA		Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2019 terhadap RPJMD 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja	70,00	70,00	100	142,85	80.00	125
2	Jumlah peserta Pelatihan yang bersertifikat	0	128	128	100	100	100
3	Jumlah peserta Pelatihan dan Pemantauan Produktifitas Kerja	80	60	0	0	0	0
4.	Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi	30	50.00	35,29	70.58	90.00	39.21

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa :

1. Capaian kinerja Pelatihan berbasis masyarakat dan berbasis kompetensi yang memiliki target 60 terealisasi sejumlah 0 orang atau 0% namun sudah dilatih pelatihan menjahit sebanyak 60 orang dari Dana Kementerian Perindustriaan RI.
2. Capaian kinerja Pelatihan peningkatan produktifitas Kerja yang memiliki target 60 orang terealisasi 0% namun sudah dilatih pelatihan menjahit sebanyak 60 orang dari Dana Kementerian Perindustriaan RI.
3. Capaian kinerja kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta yang memiliki target sejumlah 50.00 terealisasi sejumlah 35,29 atau 90%.

Faktor Pendukung Keberhasilan:

Program Peningkatan Kesempatan Kerja, meliputi kegiatan

- a. Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Berbasis Kompetensi.
Didalam kegiatan Berbasis Masyarakat dan Berbasis Kompetensi tidak dilaksanakan namun sudah tertangani di kegiatan lain dan dilatih pelatihan menjahit sebanyak 60 orang dari Dana Kementrian Perindustriaan RI.
- b. Pelatihan Peningkatan Produktifitas Kerja
Didalam kegiatan Peningkatan Produktifitas Kerja tidak dilaksanakan namun sudah tertangani di kegiatan lain dan dilatih pelatihan menjahit sebanyak 60 orang dari Dana Kementrian Perindustrian RI. Pada intinya dua kegiatan di atas sama sama tidak dilaksanakan akan tetapi kegiatan pelatihan sudah tertangani dengan Dana kemenrian Perindustrian RI yaitu menjahit sebanyak 60 orang peserta.
- c. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Swasta Tahun 2019 diikuti oleh 30 peserta dari LPK dan BLKLN diwilayah Kabupaten Madiun yang dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun Anggaran.
dilakukan pembinaan terhadap 34 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan yang telah terakreditasi sebanyak 12 LPK.

Strategi Pemecahan Masalah :

Strategi Pemecahan Masalah adalah :

Beum banyak LPK swasta yang mengetahui tentang adanya reguasi yang terbaru dan terupdate dari system online terintegrasi bidang ketenagakerjaan.

Pemahan masalah :

Perlu adanya Sosialisasi dan pembinaan secara pereodik bagi LPK swasta di Kabupaten Madiun mengenai proses perijinan melalui OSS.

Rencana Tindak Lanjut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun berupa Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja dengan kegiatan sebagai berikut

- a. Pelatihan Berbasis Masyarakat dan Berbasis Kompetensi sebesar Rp. 261.908.925,00
- b. Pelatihan untuk Peningkatan Produktifitas Kerja sebesar Rp. 22.704.445,00
- c. Pembinaan lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebesar Rp. 33.679.065,00

Program Kegiatan II :	Peningkatan Kesempatan Kerja
------------------------------	-------------------------------------

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Kesempatan Kerja							
INDIKATOR KINERJA		Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2019 terhadap RPJMD 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	66,5	67,00	89.64	133.8	75,00	119.52
2	Jumlah data Penganagguran	0	1	1	100	1	100
3	Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan	40	40	40	100	480	8,33
4	Jumlah peseta sosialisasi Prosedur Tenaga Kerja AKAD/AKAN	630	1000	865	86,5	11.500	7.52
5	Jumlah Keluarga TKI yang terlatih Reminten	80	80	0	0	4100	0
6	Jumlah calon Tenaga Kerja yang terlayani Bimbingan Jabatan.	2.000	2.250	5.670	252	13.750	41,23

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa :

1. Capaian kinerja Pencari Kerja yang ditempatkan yang memiliki target 67,00% terealisasi sejumlah 91,02 orang atau 135,9%.
2. Capaian kinerja Pendataan Pengangguran yang memiliki target 1 Dokumen atau 206 desa terealisasi 201 desa atau 97,57%.
3. Capaian kinerja Kegiatan Penciptaan Kewirausahaan Baru yang memiliki target sejumlah 40 orang terealisasi sejumlah 40 orang atau 100%.
4. Capaian kinerja Kegiatan Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja yang memiliki target sejumlah 1000 orang terealisasi sejumlah 865 orang atau 86,5%.
5. Capaian kinerja Pelatihan Pengelolaan Edukasi bagi keluarga TKI yang memiliki target 80 terealisasi sejumlah 0% tidak dilaksanakan namun capaian kegiatan sudah tertangani di kegiatan lain.
6. Capaian kinerja Kegiatan Pelayanan Antar Kerja yang memiliki target 2.250 terealisasi sejumlah 0% Tidak dilaksanakan namun capaian kegiatan sudah tertangani di kegiatan lain

Faktor Pendukung Keberhasilan:

Program Peningkatan Kesempatan Kerja, meliputi kegiatan

a. Kegiatan Pendataan Pengangguran

Dalam rangka memperoleh jumlah data **pengangguran** yang akurat di Kabupaten Madiun, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun akan menyelenggarakan Kegiatan Pendataan Pengangguran penduduk dengan usia kerja yaitu 15 tahun sampai dengan usia 64 tahun di seluruh desa yang ada di Kabupaten Madiun dengan **kriteria pengangguran** sebagai berikut :

- mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan;
- mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha;

- mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Tujuan Kegiatan

1. Dengan adanya kegiatan ini dapat diperoleh jumlah pengangguran yang ada di masing-masing desa se wilayah Kabupaten Madiun.
2. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mengatasi kemiskinan.
3. Membantu Pemerintah Kabupaten Madiun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pelaksanaan kegiatan

Sumber Dana dan besarannya

Pelaksanaan kegiatan Pendataan Pengangguran di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019, dengan kode rekening 1.14.1.14.01.16.24 sebesar Rp. 420.177.780,-

Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan adalah Pengangguran yang ada di Kabupaten Madiun

Lokasi Kegiatan

206 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Madiun

Volume Kegiatan

Kegiatan Pendataan pengangguran kami laksanakan pada bulan September dan Oktober diawali dengan kegiatan pembekalan kepada Petugas Desa di Aula Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun dengan jadwal sebagai berikut:

Jadwal Pelaksanaan Pembekalan
Bagi Petugas Pendata Pengangguran tahun 2019.

	Kecamatan	Jml Desa	Jmlh peserta	Tgl pelaksanaan
	Kebonsari	14	56	10 September 2019
	Dolopo	12	48	“
	Geger	19	76	“
	Dagangan	17	68	11 September 2019
	Kare	8	32	“
	Wungu	14	56	“
	Sawahan	13	52	17 September 2019
	Madiun	13	52	“
	Jiwan	14	56	“
	Balerejo	18	72	18 September 2019
	Mejayan	14	56	“
	Wonoasri	10	40	“
	Pilangkenceng	18	72	24 September 2019
	Saradan	15	60	“
	Gemarang	7	28	“
	JUMLAH	206	824	

b. Kegiatan Penciptaan Kewirausahaan Baru .

Pekerjaan menjadi bagian yang penting dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pekerjaan sebagai wujud dari aktualisasi diri kepada keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Namun pada kenyataannya, hak tersebut tidak bisa dinikmati oleh setiap warga negara Indonesia, karena terbatasnya kesempatan kerja. Lowongan kerja yang tersedia tidak mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang ada, karena ketidak seimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan yang dapat memberikan kesempatan kerja kepada setiap orang, baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja. Untuk itu perlu dukungan semua pihak dalam upaya menciptakan dan memperluas kesempatan kerja salah satunya yaitu dengan Kegiatan Penciptaan Wirausah Baru (WUB)

Tujuan Kegiatan

1. Untuk menciptakan lapangan kerja bagi pengangguran
2. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Madiun dalam mengatasi kemiskinan.
3. Membantu Pemerintah Kabupaten Madiun untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya

Pelaksanaan kegiatan

Sumber Dana dan besarannya

Pelaksanaan kegiatan Penciptaan Wirausaha Baru di danai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019, dengan kode rekening 1.14.1.14.01.16.25 sebesar Rp. 94.995.670,-

Sasaran Kegiatan1

Sasaran kegiatan adalah Pengangguran yang ada di Kabupaten Madiun

Lokasi Kegiatan

Desa Kwangsen Kec. Jiwan dan Desa Nglanduk Kec. Wungu

Volume Kegiatan

Kegiatan Penciptaan Wirausaha Baru kami laksanakan di bulan Oktober dan Nopember 2019 dengan kegiatan **pelatihan membatik** yang diikuti 2 Kelompok dengan masing-masing kelompok sejumlah 20 Orang.

Pelaksanaan Kegiatan / bentuk Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan untuk masing-masing kelompok kami laksanakan selama 5 hari dengan jadwal sebagai berikut:

**Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Penciptaan Wirausaha Baru Tahun 2019**

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Ket.
1	Pelatihan Membatik	Desa Kwangsen Kec. Jiwan	21 s/d 25 Oktober 2019	
2	Pelatihan Membatik	Desa Nglanduk Kec. Wungu	4 s/d 8 Nopember 2019	

c. Kegiatan Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja

Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja merupakan salah satu seksi di Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yang salah satu tugasnya adalah sebagai Fasilitator bagi pencari kerja maupun pemberi kerja agar terjadi matching antara kemampuan pencari kerja dan juga apa yang dibutuhkan pemberi kerja tersebut, Upaya untuk memfasilitasi kegiatan tersebut adalah dengan program peningkatan kesempatan tenaga kerja melalui kegiatan Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) / AKAN (Antar Kerja Antar Negara) dalam bentuk sosialisasi kepada pencari kerja dari lingkungan dunia pendidikan (sekolah-sekolah) maupun masyarakat umum. Lulusan SMK sebagai sasaran potensial kegiatan sosialisasi ini dimaksudkan dalam upaya memberikan bekal wawasan masalah dunia ketenagakerjaan yang selama ini masih dipahami secara sempit, demikian pula bagi masyarakat umum utamanya pencari kerja yang aktif mencari peluang dunia kerja, dikenalkan kiat-kiat memasuki pasar kerja. Materi yang disampaikan pada umumnya informasi-informasi seputar dunia kerja yang potensial untuk diakses oleh pencari kerja, karena pada prinsipnya dunia kerja tidak selalu dapat berjalan linier dengan dasar-dasar ketrampilan/jurusan yang diambil pada saat duduk di bangku sekolah.

Tujuan Kegiatan

- a. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat mengurangi pengangguran yang ada di wilayah Kabupaten Madiun dan dapat mempermudah perusahaan untuk mendapatkan tenaga kerja sesuai kualifikasi dan jabatan yang dibutuhkan.

- b. Mencegah terjadinya Penempatan secara Ilegal (TKI Ilegal)
- c. Membantu Pencari Kerja mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan yang dimiliki guna meningkatkan Pendapatan bagi Calon Tenaga Kerja yang pada akhirnya meningkatkan Kesejahteraan keluarganya.

Pelaksanaan Kegiatan :

a. *Sumber Dana dan besarnya*

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penempatan Tenaga kerja AKAD / AKAN didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019, dengan kode rekening 1.14.1.14.01.16.26 sebesar Rp. 152.250.285,-

b. *Sasaran Kegiatan*

Sasaran kegiatan adalah Pencari Kerja sebanyak 865 orang di wilayah Kabupaten Madiun baik dari kalangan sekolah maupun masyarakat umum.

c. *Lokasi / Voume Kegiatan*

NO	TEMPAT/LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	JML PESERTA
	SMK PGRI Wonoasri	15 Pebruari 2019	200 Orang
	SMKN Kare	19 Pebruari 2019	115 Orang
	SMK Wijaya Kusuma	20 Pebruari 2019	100 Orang
	SMKN 1 Geger	22 Pebruari 2019	225 Orang
	SMKN 2 Jiwan	28 Pebruari 2019	225 Orang

d. **Pelatihan Pengelola Edukasi Reminten bagi Keluarga TKI.**

Pelatihan Pengelolaan Edukasi Reminten bagi keluarga TKI yang memiliki target 80 terealisasi sejumlah 0% kegiatan tidak dilaksanakan biarpun kegiatan tidak dilaksanakan namun capaian kinerja bisa terkafer di pelatihan kegiatan lain yaitu menjahit sebanyak 80 orang . dengan Anggaran Kementerian Perindustrian RI.

e. **Kegiatan Pelayanan Antar Kerja.**

Kegiatan Pelayanan Antar Kerja yang memiliki target 2.250 terealisasi sejumlah 0%

tidak diserap dikarenakan kinerja pelayanan bagi Calon Tenaga Kerja sudah dapat terlayani kebutuhan informasi penempatan tenaga kerja dan AK-1 (Kartu Kuning), yaitu sebanyak 6,325 pencaker

Yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.

Permasalahan yang dihadapi

- a. Dari 206 desa yang diundang untuk pembekalan, 179 desa hadir sedangkan 27 desa tidak hadir
- b. Dari 206 desa yang ada , yang sudah menyetorkan data pengangguran sebanyak 201 desa sedangkan 5 desa tidak menyetorkan data penganggurannya. dengan 5 desa dalam proses kecukupan data yaitu desa Grobogan kecamatan Jiwan, desa Pucanganom kecamatan Kebonsari, desa Wonoasri kecamatan Wonoasri, desa Sugihwaras kecamatan Saradan dan desa Gading kecamatan Balerejo.

Upaya penyelesaian masalah

- a. PPTK dan Pengantar kerja mendatangi 27 Desa yang tidak hadir untuk diberikan pembekalan sebelum pelaksanaan pendataan pengangguran
- b. PPTK sudah membuat surat tagihan sebanyak 2 kali kepada desa yang tidak meyetorkan data penganggurannya.(surat tagihan terlampir)

Strategi Pemecahan Masalah :

Strategi Pemecahan Masalah adalah :

Rencana Tindak Lanjut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun berupa Program Peningkatan Keempatan Kerja dengan kegiatan sebagai berikut

- a. Pelatihan Pengelolaan Edukasi Peminten bagi Keluarga TKI sebesar Rp. 33.013.860,00
- b. Pelayanan Antar Kerja sebesar Rp. 116173.750,00
- c. Pendataan Pengangguran sebesar Rp. 420.177.780,00
- d. Penciptaan Wirausaha Baru Rp. 94.995.670,00
- e. Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja (DID) Rp. 152.250.285,00

Program Kegiatan III :	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
-------------------------------	--

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan							
INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2019 terhadap RPJMD 2023(%)	
		Target	Realisasi	% Capaian			
Angka Sengketa Perusahaan pekerja per tahun (%)	58,33	75,00	100	133.33	95,00	105.26	
1 Jumlah Peserta Pembinaan Kapasitas Lembaga	10	10	20	200	10	200	
2 Jumlah LKS Tripatit yang aktif	0	1	1	100	1	100	
3 Jumlah data Ketenagakerjaan yang divalidasi	0	500	0	0	0	0	
4 Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industri yng diselesaikan	12	15	15	100	125	0.12	
5 Jumlah Syarat Kerja dan PP/KB yang disusun	30	30	30	100	150	0.20	
6 Jumlah Rumusan Kebijakan /Rekomendasi terkait	1	1	1	100	1	100	

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa :

1. Capaian kinerja Angka Sengketa Perusahaan-pekerja per tahun yang memiliki target sejumlah 75,00% terealisasi sejumlah 100% perusahaan atau 133 33%.
2. Capaian kinerja kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ketenagakerjaan yang memiliki target sejumlah 10 kali terealisasi sejumlah 20 kali atau 200%
3. Capaian kinerja kegiatan Pemberdayaan LKS Tripartit yang memiliki target sejumlah 1 terealisasi sejumlah 1.lembaga atau 100%.
4. Capaian kinerja kegiatan Pendataan dan Validasi Data Ketenagakerjaan yang memiliki target sejumlah 500 orang terealisasi sejumlah 0 orang atau 0%.
5. Capaian kinerja kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan (DID) yang memiliki target sejumlah 15 perusahaan terealisasi sejumlah 15 perusahaan atau 100%.
6. Capaian kinerja kegiatan Pembinaan Syarat Kerja di perusahaan (DID) yang memiliki target sejumlah 30 terealisasi sejumlah 30 atau 100%.
7. Capaian kinerja kegiatan Penyusunan Upah Minimum kabupaten (DID) yang memiliki target sejumlah 1 Dokumen terealisasi sejumlah 1 Doumen orang atau 100%.

Faktor Pendukung Keberhasilan:

Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga Ketenagakerjaan meliputi kegiatan .

- a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga Ketenagakerjaan.
 1. Dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara tenaga kerja dan pengusaha maka perlu adanya penguatan kelembagaan Hubungan Industrial di tingkat perusahaan . Hubungan yang harmonis antara tenaga kerja dan pengusaha merupakan kunci utama untuk meningkatkan produktifitas perusahaan, kesejahteraan tenaga kerja,

mencegah PHK dan memperluas kesempatan kerja serta menanggulangi pengangguran.

2. Terjadinya ketidakcocokan antara pekerja dan pengusaha merupakan dinamika dalam hubungan kerja, oleh karenanya kedua belah pihak harus bisa duduk bersama, saling menghormati karena merupakan mitra kerja yang harus saling mendukung untuk kepentingan bersama.
3. Guna mewujudkan kondisi tersebut Dinas Tenaga Kerja sebagai unsur pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk melakukan penguatan kelembagaan hubungan industrial seperti yang telah dilaksanakan yakni Pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pemberdayaan dan Pembinaan LKS Bipartit serta Verifikasi SP/SB dalam rangka Peningkatan Kapasitas Lembaga Ketenagakerjaan.
4. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serikat pekerja/buruh dalam hal :
 - a. Peraturanperundang-undangan
 - b. Hakdankuwajiban
 - c. Peran dan fungsi serikat pekerja/buruh dalam perusahaan

b. Kegiatan Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan

Dengan adanya hubungan industrial yang harmonis dalam suatu perusahaan, maka akan dapat meningkatkan produktivitas dan kerja sama antara karyawan dan pengusaha sehingga perusahaan dapat berjalan dengan baik.

Dalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis maka Dinas Tenaga Kerja sebagai unsur pemerintah perlu menyelenggarakan pembinaan dan sosialisasi mengenai sarana hubungan industrial secara berkesinambungan kepada pengusaha dan tenaga kerja. Pekerja dan pengusaha seperti mata uang yang tidak terpisahkan dari 50 undangan yang hadir 47 orang. Terdiri dari perwakilan karyawan, pengusaha dan Serikat Kerja/buruh.

- Hubungan Industrial yang baik apabila dalam penyelesaian perselisihannya dapat diselesaikan di tingkat bipartit.
 - Arah pembangunan Hubungan Industrial adalah membangun hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
 - Penyelesaian perselisihan Hubungan industrial yang baik dan kondusif dapat mendukung pertumbuhan perekonomian.
 - Mediator Menangani Permasalahan Ketenagakerjaan terkait masalah perdata yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan
- c. Pemberdayaan Lembaga Kerja sama (LKS) Tripartit.
- a. Lembaga kerjasama Tripartit merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah yang sangat strategis untuk membahas masalah-masalah ketenagakerjaan sebagai bahan penyusunan kebijakan di provinsi maupun di kabupaten/kota serta juga mengatur keorganisasian hubungan industrial melalui peraturan kepala daerah tentang lembaga kerjasama tripartit sebagai bentuk upaya nyata pemerintah sebagai lembaga pengambil kebijakan untuk memberikan legitimasi atas perlindungan hak pekerja atau buruh dan pengusaha secara adil.
 - b. Dalam rangka melaksanakan hubungan industrial tersebut, pemerintah mempunyai fungsi menyiapkan kebijakan, melaksanakan pengawasan termasuk melakukan penindakan terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan. Karena penyelenggaraan ketenagakerjaan merupakan tanggungjawab pemerintah yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan professional dengan tujuan :
 - Untuk menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
 - Terwujudnya ketenangan kerja dan kemajuan berusaha.

Sasaran Kegiatan

Memberdayakan Lembaga Kerjasama Tripartit dengan Kegiatan Dialog antara Pekerja, Pengusaha dan Pemerintah

Lokasi Kegiatan

Kegiatan di Laksanakan Di Pendopo Ronggo Jumeno Puspem Caruban Kabupaten Madiun, adapun Perusahaan yang mengikuti MOU Rekrutmen dengan Bapak Bupati Madiun sebanyak 21 perusahaan.

d. Kegiatan pembinaan Syarat Kerja

Pembinaan Syarat Kerja ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada wakil pengusaha dan pekerja agar mampu membuat peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama serta meningkatkan kuantitas dan kualitas peraturan perusahaan serta perjanjian kerja bersama yang dibuat. Dan mampu Meminimalisir pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh pengusaha dan pekerja di dalam perusahaan sehingga terciptanya Hubungan industrial yang harmonis, dinamis, seimbang dan berkeadilan.

Bentuk kegiatan Pembinaan syarat Kerja di Perusahaan adalah :

1. Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama adalah dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari (6 jam pelajaran) dengan materi :

- Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait kewajiban membuat Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

b. Kepesertaan

- Peserta berjumlah 70 orang hadir 63 orang.

e. Kegiatan Penyusunan Upah Minimum

Pelaksanaan Kegiatan Bintek Tata Cara pembuatan Struktur Skala Upah dilaksanakan selama 1 hari (4 jam pelajaran) dengan materi : kewajiban

membuat Struktur Skala Upah bagi perusahaan. Dari undangan 70 orang yang hadir 59 orang.

Dalam sambutan disampaikan antara lain :

- Upah Minimum Kabupaten merupakan upah terendah yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja
- Upah Minimum ditetapkan pemerintah sebagai jaring pengaman bagi pekerja lajang dengan masa kerja tidak lebih dari 1 tahun
- Pengusaha dilarang membayar upah dibawah Upah Minimum Kabupaten
- Bagi Pengusaha yang belum mampu membayar upah Minimum sasar membuat penangguhan kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.
- Upah Minimum Kabupaten mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020

Permasalahan:

Perusahaan / pengusaha dan pekerja yang diundang belum mewakili jumlah perusahaan/pengusaha di Kabupaten Madiun karena keterbatasan anggaran.

Strategi Pemecahan Masalah :

Strategi Pemecahan Masalah adalah :

Rencana Tindak Lanjut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun berupa Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Ketenagakerjaan sebesar Rp. 47.744.720,00
- b. Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit sebesar Rp. 140.763.965,00
- c. Pendataan dan Validasi Data Ketenagakerjaan sebesar Rp. 52.757.500,00

- d. Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan (DID) sebesar Rp. 65.062.910,00
- e. Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan (DID) sebesar Rp. 52.670.050,00
- f. Penyusunan Upah Minimum Kabupaten (DID) sebesar Rp. 71.951.950,00

Program Kegiatan IV :	Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan
------------------------------	---

Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan							
INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2019 terhadap RPJMD 2023 (%)	
		Target	Realisasi	% Capaian			
	Prosentase peserta pelatihan yang terseleksi sesuai ketentuan		60.00	100	166.66	80.00	75
1	Jumlah peserta Pelatihan Ketrampilan Kerja		128	128	100	128	100

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa :

1. Capaian kinerja kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan masyarakat (cukai) yang memiliki target sejumlah 60,00% terealisasi sejumlah 166.66 %
2. Capaian kinerja kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan masyarakat (cukai) yang memiliki target sejumlah 128 orang 8 paket Pelatihan terealisasi sejumlah 128 orang 8 paket Pelatihan atau 100%.

Permasalahan yang dihadapi

Pemerintah Kabupaten Madiun belum memiliki Balai Latihan Kerja sendiri sehingga Balai Pelatihan banyak yang terserap pada Retribusi Sewa Peralatan Pelatihan yang dimiliki oleh UPT Pelatihan Kerja Provinsi Jawa Timur.

Upaya penyelesaian Masalah

Peru adanya kaaian Pembangunan Ballai latihan Kerja di Kabupaten Madiun.

Strategi Pemecahan Masalah

Rencana Tindak Lanjut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun berupa Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan masyarakat (cukai) sebesar Rp. 1.000.000.0000,00

Program Kegiatan V :	Pengembangan Wilayah Transmigrasi
-----------------------------	--

Pencapaian target kinerja atas Program ini adalah sebagai berikut :

Meningkatkan Pengembangan Wilayah Transmigrasi						
INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2018	Tahun 2019			Target Akhir RPJMD 2023	Capaian 2019 terhadap RPJMD 2023(%)
		Target	Realisasi	% Capaian		
Persentase Transmigrasi Umum yang berhasil	50.00	100.00	97,82	97,82	100	100

1	Jumlah Animo Transmigrasi	135	135	138	102	135	100
2	Jumlah Kesepakatan (MoU)	1	1	1	100	1	100
3	Jumlah Transmigran siap diberangkatkan (KK)	2	2	4	200	22	18,18

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa:

1. Capaian Kinerja kegiatan Pengerahan Transmigrasi memiliki target sebesar 135 KK dan terealisasi sebesar 138 atau 102 %
2. Capaian Kinerja kegiatan Kerjasama Antar Daerah di Bidang Transmigrasi memiliki target sebesar 1 Kesepakatan dan terealisasi sebesar 1 Kesepakatan atau 100%
3. Capaian Kinerja kegiatan Fasilitasi Pemindahan Transmigrasi memiliki target sebesar 2 KK dan terealisasi sebesar 4 KK atau 40%

Faktor Pendukung Keberhasilan:

a) Kegiatan Sosialisasi Ketransmigrasian

Sosialisasi ketransmigrasian dilaksanakan di Aula Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun dengan peserta sejumlah 30 orang peserta adalah calon transmigran yang mendaftar yang masuk dalam kriteria persyaratan bertransmigrasi.

b) Kegiatan Seleksi Calon Transmigran

Sekelsi Calon Transmigran dilaksanakan di Aula Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun dengan peserta sejumlah 20 KK diambil sejumlah 4 KK sesuai kuota dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

a) Kegiatan Pemberangkatan Transmigran

Sesuai dengan kuota dari Provinsi Jawa Timur bahwa Kabupaten Madiun mendapat alokasi sebanyak 4 KK dengan jumlah 13 Jiwa ke UPT Tanjung Buka SP. 6 B Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara , dengan Nama Calon Transmigran sebagai berikut :

No	Nama	Umur	Pendidikaan	Keluarga	Nama
1.	Andri Dw Purnomo	27	SMP	2	Ds. Kreet,.Kec. Pilangkengceng
2.	Andi Irawan	33	SMP	2	Ds.Bener, Kec.Saradan
3.	Lamijan	43	SD	3	Ds. Bolo, Kec. Kare
4.	Iswandi	42	SD	2	Ds. Bolo, Kec. Kare

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/ kegiatan adalah :

1. Belum diperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi lahan penempatan transmigrasi yang akan dituju.
2. Calon Transmigran yang berangkat cenderung berubah-ubah pendirian menjelang pemberangkatan.
3. Calon Transmigran masih mempunyai anak usia sekolah atau akan Ujian Akhir Sekolah..

Strategi Pemecahan Masalah :

Strategi Pemecahan Masalah adalah :

1. Melakukan komunikasi dengan daerah tujuan guna memperoleh kondisi dan perkembangan lokasi penempatan transmigrasi.
2. Mengkondisikan Calon Transmigran jauh-jauh hari sebelumnya untuk mempersiapkan diri dan keluarganya.
3. Melakukan seleksi dan pemantapan catran secara bertahap, sehingga dapat dibedakan antara catran yang serius atau masih ragu-ragu.
4. Calon Transmigran yang masih mempunyai anak yang akan ujian sekolah disarankan untuk menitipkan anak ke Saudara dan menyusul dilain hari setelah ujiannya selesai.
5. Mengadakan pembinaan terhadap Calon Transmigran agar Calon Transmigran tetap berada di tempat dan mantap untuk mengikuti transmigrasi.

Rencana Tindak Lanjut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun berupa Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dengan kegiatan :

- a. Pengerahan Transmigrasi sebesar Rp. 16.755.050,00.
- b. Kerjasama Antar Daerah di Bidang Transmigrasi sebesar Rp. 8.128.440,00.
- c. Pemandahan Transmigrasi sebesar Rp. 33.453.145,00.

D. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2019, yang disusun dalam 8 Program dan 39 Kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- .1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan indikator
 - a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat dengan capaian kinerja input mencapai 14,47%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
 - b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian kinerja input mencapai 73,57%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan capaian kinerja input mencapai 98,47%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
 - d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan capaian kinerja input mencapai 87,03%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
 - e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan capaian kinerja input mencapai 87,82%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%

- f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor dengan capaian kinerja input mencapai 51,19%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian kinerja input mencapai 66,50%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
 - h. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman dengan capaian kinerja input mencapai 87,85%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
 - i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan capaian kinerja input mencapai 98,64% , sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
 - j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dengan capaian kinerja input mencapai 99,23%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
 - k. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dengan capaian kinerja input mencapai 97,12%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
 - l. Penyediaan Jasa Instruktur Senam dengan capaian kinerja input mencapai 25,00%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
 - m. Penyediaan Jasa Penujang Kerja SKPD dengan capaian kinerja input mencapai 100%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan indikator
- a. Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan capaian kinerja input mencapai 100%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
 - b. Kegiatan Pengadaan peralatan kantor dengan capaian kinerja input mencapai 99,37%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan capaian kinerja input mencapai 99,53%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%

- d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dengan capaian kinerja input mencapai 45.59%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur dengan capaian kinerja input mencapai 9.38%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
 - f. Kegiatan Rutin/Berkala Alat Kantor Pendukung (Komputer/Printer/AC dan Mesin Tik) dengan capaian kinerja input mencapai 71.60%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
- 3.** Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan indikator :
- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ralisasi Kinerja SKPD dengan capaian kinerja input mencapai 87,07%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
 - b. Kegiatan Penilaian Angkat Kredit dengan capaian kinerja input mencapai 53.50%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
- 4.** Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja.
- a. Kegiatan Pelatihan berbasis masyarakat dan berbasis kompetensi dengan capaian kinerja input mencapai 0 %, sedangkan output dan outcome nya mencapai 0%
 - b. Kegiatan untuk peningkatan produktifitas Kerja mencapai 0,00%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 0,00%
 - c. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan capaian kinerja input mencapai 89,36%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
- 5.** Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- a. Kegiatan Pengelolaan Edukasi Reminten bagi Keluarga TKI dengan capaian kinerja input mencapai 0%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 0%

- b. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja dengan capaian kinerja input mencapai 0%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 0%
 - c. Kegiatan Pendataan Pengangguran dengan capaian kinerja input mencapai 89.38%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
 - d. Kegiatan Penciptaan Wirausaha Baru dengan capaian kinerja input mencapai 60.19%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
 - e. Kegiatan Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja (DID) dengan capaian kinerja input mencapai 90.07%, sedangkan output dan outcome nya mencapai 100%
6. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan indikator :
- a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Ketenagakerjaan dengan capaian kinerja input mencapai 54.66%, sedangkan output dan outcomenya mencapai 100%.
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kerja sama (LKS) Tripartit dengan capaian kinerja input mencapai 47.17%, sedangkan output dan outcomenya mencapai 100%.
 - c. Kegiatan Pendataan dan Validasi Data Ketenagakerjaan (DID) dengan capaian kinerja input mencapai 0%, sedangkan output dan outcomenya mencapai 0%.
 - d. Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan (DID) dengan capaian kinerja input mencapai 67.89%, sedangkan output dan outcomenya mencapai 100%.
 - e. Kegiatan Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan (DID) dengan capaian kinerja input mencapai 74.57%, sedangkan output dan outcomenya mencapai 100%.
 - f. Kegiatan Penyusunan Upah Minuman kabupaten kinerja input mencapai 75.35%, sedangkan output dan outcomenya mencapai 100%.
7. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

a. Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan masyarakat (Cukai) kinerja input mencapai 80.58%, sedangkan output dan outcomenya mencapai 100%.

8. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dengan indikator :
Persentase Transmigrasi Umum yang berhasil.

a. Kegiatan Pengerahan Transmigrasi kinerja input mencapai 89.01%, sedangkan output dan outcomenya mencapai 100%.

b. Kegiatan Kerjasama Antar Daerah dibidang Transmigrasi kinerja input mencapai 91.84%, sedangkan output dan outcomenya mencapai 100%.

c. Kegiatan Pemindahan Transmigrasi kinerja input mencapai 36.70%, sedangkan output dan outcomenya mencapai 100%.

Dalam tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun mengelola dana yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Madiun sebesar Rp, 2.705.139.472,00 dan Cukai sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. APBD Kabupaten Madiun

No	Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	667.266.500	662.728.885	93,31
1	Penyediaan jasa surat menyurat	753.200	109.000	14,47
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.739.940	54.986.078	73,57
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	105.029.353	103.424.500	98,47
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	61.909.400	53.880.350	87,03
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.758.373	10.326.650	87,82
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	7.189.655	3.680.600	51,19

	Bangunan Kantor			
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.220.000	4.136.000	66,50
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.350.400	14.365.000	87,85
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah	205.018.000	202.222.007	98,64
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam daerah	60.000.000	59.540.000	99,23
11	Penyediaan Jasa Keamanan	129.289.589	125.563.700	97,12
12	Penyediaan Jasa Instruktur	1.980.000	495.000	25,00
13	Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	30.000.000	30.000.000	100
B	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	274.784.702	170.096.843	61,90
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor	1.320.000	1.320.000	100
2	Pengadaan Peralatan Kantor	12.730.575	11.650.000	99,37
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	46.635.707	46.416.303	99,53
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	158.108.090	72.077.540	45,59
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	3.943.665	370.000	9,38
6	Pemeliharaan rutin/berkala alat kantor pendukung (komputer/printer/ac dan mesin tik)	52.046.665	37.263.000	71,60
C	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	95.925.350	78.528.000	81,86
1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan SKPD	92.000.000	76.428.000	83,07
2	Penilaian Angka Kredit	3.925.350	2.100.000	53,50
D	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	318.292.435	30.096.300	9,46
1	Pelatihan Berbasis masyarakat dan Berbasis Kompetensi	261.908.925	0	0

2	Pelatihan untuk Peningkatan Produktifitas Kerja	22.704.445	0	0
3	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	33.679.065	30.096.300	89,36
F	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	816.611.345	569.840.000	69,78
1	Pendataan Pengangguran	420.177.780	375.535.000	89,38
2	Penciptaan Wirausaha Baru	94.995.670	57.180.000	60,19
3	Sosialisas Penempatan Tenaga Kerja (DID)	152.250.285	137.125.000	90,07
4	Pelatihan Pengelolaan Edukasi Reminten bagi Keluarga TKI	33.013.860	0	0
5	Pelayanan Antar Kerja	116.173.750	0	0
G	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	430.951.095	230.161.750	53,41
1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Ketenagakerjan	47.744.720	26.099.000	54,66
2	Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit	140.763.965	66.402.250	47,17
3	Pendataan dan Validasi Data Ketenagakerjaan (DID)	52.757.500	0	0
4	Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	65.062.910	44.168.000	67,89
5	Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	52.670.050	39.274.500	74,57
6	Penyusunan Upah Minimum Kabupaten	71.951.950	54.218.000	75,35
H	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN (CUKAI)	1.000.000.000	805.777.405	80,58
1	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Cukai)	1.000.000.000	805.777.405	80,58
I	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	58.336.635	34.655.500	59,41

1	Pengerahan Transmigrasi	16.755.050	14.914.000	89,01
2	Kerjasama Antar Daerah Bidang Transmigrasi	8.128.440	7.465.500	91,84
3	Pemindahan Transmigrasi	33.453.145	12.276.000	36,70
	Jumlah	3.705.139.472	2.581.884.683	69,68

ANALISIS EFISIENSI

Berdasarkan Tabel dibawah ini diperoleh gambaran Analisis Efisiensi Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Efisiensi Anggaran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pengembangan dan Produktifitas Tenaga Kerja .

NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2019	% CAPAIAN	EFISIENSI
1	2	3	7	8	9	10
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja	318.292.435	30.096.300	9,46	288.195.135
	Pelatihan Berbasis masyarakat dan Berbasis Kompetensi	Jumlah peserta Pelatihan yang bersertifikat	261.908.925	0	0	Tidak Dilaksanakan
	Pelatihan untuk Peningkatan Produktifitas Kerja	Jumlah peserta Pelatihan dan Pemantauan Produktifitas Kerja	22.704.445	0	0	Tidak Dilaksanakan
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase lembaga pelatihan yang terakreditasi	33.679.065	30.096.300	89,36	3.582.765 Efisien

2. Efisiensi Anggaran pada Program Kegiatan Peningkatan Kesempatan Kerja

NO	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2019	% CAPAI AN	EFISIENSI
1	2	3	7	8	9	10
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	816.611.345	569.840.000	69.78	264.771.345
	Pendataan Pengangguran	Jumlah data Pengangguran	420.177.780	375.535.000	89,38	44.642.780 Efisien
	Penciptaan Wirausaha Baru	Jumlah peserta Pelatihan Kewirausahaan	94.995.670	57.180.000	60,19	37.815.670 Efisien
	Sosialisas Penempatan Tenaga Kerja (DID)	Jumlah peseta sosialisasi Prosedur Tenaga Kerja AKAD/AKAN	152.250.285	137.125.000	90.07	15.125.285 Efisien
	Pelatihan Pengelolaan Edukasi Reminten bagi Keluarga TKI	Jumlah Keluarga TKI yang terlatih Reminten	33.013.860	0	0	Tidak Dilaksanakan
	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah calon Tenaga Kerja yang terlayani Bimbingan Jabatan.	116.173.750	0	0	Tidak Dilaksanakan

3. Efisiensi Anggaran pada Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan :

No.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2019	% CAPAI AN	EFISIENSI
1	2	3	7	8	9	10
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka Sengeta perusahaan pekerja per tahun %	430.951.095	230.161.750	53.41	200.789.345
	Peningkatan Kapasitas Lembaga	Jumlah Peserta Pembinaan Kapasitas	47.744.720	26.099.000	54,66	21.645.720 Efisien

	Ketenagakerjan	Lembaga				
	Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit	Jumlah LKS Tripartit yang aktif	140.763.965	66.402.250	47,17	74.361.715 Efisien
	Pendataan dan Validasi Data Ketenagakerjaan (DID)	Jumlah data Ketenagakerjaan yang divalidasi	52.757.500	0	0	Tidak Dilaksanakan
	Pembinaan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	Jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industri yng diselesaikan	65.062.910	44.168.000	67,89	20.894.910 Efisien
	Pembinaan Syarat Kerja di Perusahaan	Jumlah Syarat Kerja dan PP/KB yang disusun	52.670.050	39.274.500	74,57	13.395.550 Efisien
	Penyusunan Upah Minimum Kabupaten	Jumlah Rumusan Kebijakan /Rekomendasi terkait	71.951.950	54.218.000	75.35	17.733.950 Efisien

4. Efisiensi Anggaran pada Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Culkai)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2019	% CAPAIAN	EFISIENSI
1	2	3	7	8	9	10
	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN (CUKAI)	Jumlah peserta pelatihan yang terseleksi sesuai ketentuan	1.000.000.000	805.777.405	80,58	194.222.595
	Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat (Cukai)	Jumlah peserta Pelatihan Ketrampilan Kerja	1.000.000.000	805.777.405	80,58	194.222.595 Efisien

5. Efisiensi Anggaran pada Program Kegiatan Transmigrasi

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2019	REALISASI ANGGARAN 2019	% CAPAIAN	EFISIENSI
1	2	3	7	8	9	10
	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI	Persentase Transmigrasi Umum yang berhasil	58.336.635	34.655.500	59,41	23.681.135
	Pengerahan Transmigrasi	Jumlah Animo Transmigrasi	16.755.050	14.914.000	89,01	1.841.050 Efisien
	Kerjasama Antar Daerah Bidang Transmigrasi	Jumlah Kesepakatan (MoU)	8.128.440	7.465.500	91,84	662.940 Efisien
	Pemindahan Transmigrasi	Jumlah Transmigran siap diberangkatkan (KK)	33.453.145	12.276.000	36,70	21.177.145 Efisien

